

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pantai Nguyahan

Pantai Nguyahan merupakan salah satu Pantai yang terletak di Desa Kanigoro Kec. Saptosari, Kab. Gunungkidul Yogyakarta. Pantai Nguyahan berada tepat di sebelah barat Pantai Ngobaran dengan jarak kurang lebih 200 meter (eksotisjogja.com, n.d.). Jika di ukur jarak dari kota Yogyakarta, Pantai Nguyahan memiliki jarak sekitar 70km dan dapat di tempuh dengan durasi waktu sekitar 1,5 jam perjalanan. Sejarah Pantai Nguyahan yang telah terkenal di masyarakat adalah bahwa sejak zaman belanda Pantai Nguyahan terkenal sebagai tempat pembuatan garam dengan cara tradisional, dalam Bahasa jawa *uyah* adalah garam, orang jawa sendiri menyebut Nguyahan yang berarti adalah tempat pembuatan garam (gunungkidulku.com, 2016).

Pantai Nguyahan hingga saat ini masih cenderung sepi, meskipun di sebelahnya sudah cukup ramai yaitu Pantai ngobaran yang sudah cukup dikenal. Pantai Nguyahan letaknya cukup tersembunyi, berada di balik perbukitan karang yang cukup tinggi seakan menutupi keindahan Pantai Nguyahan, karena situasi seperti ini juga menjadi daya Tarik tersendiri bagi wisatawan untuk menginjakkan kaki di Pantai yang masih cenderung sepi. Pantai ini di kelilingi oleh batuan gunungsewu, dari Pantai ini dapat kita lihat beberapa rumah nelayan, jalan belum sepenuhnya beraspal, membuat situasi di sekitar Pantai nampak alami, rapi, juga eksotis. (teluklove.com, 2017)

2. Fasilitas Pantai Nguyahan

Pantai Nguyahan merupakan salah satu objek wisata yang baru di kembangkan, namun dari sisi fasilitas, Pantai Nguyahan telah melengkapi beberapa fasilitas, diantaranya adalah:

a. Toilet Umum

Secara umum toilet adalah kebutuhan pokok yang senantiasa di butuhkan pengunjung di objek wisata manapun, termasuk di Pantai Nguyahan terdapat satu bangunan toilet umum berstandard nasional yang sudah selesai di bangun namun belum di operasikan karena menunggu instrukai dari Dinas Pariwisata, serta beberapa toilet umum lain yang di sediakan masyarakat untuk keperluan pengunjung. Beberapa warung di Pantai Nguyahan juga menyediakan toilet umum, rata-rata warung menyediakan antara 5-10 kamar mandi yang sekaligus berfungsi sebagai kamar ganti dan toilet untuk pengunjung.

b. Kios Pedagang

Terdapat lebih kurang 20 kios pedagang yang tertata rapi terletak pada area khusus di Kawasan Pantai Nguyahan. Pada kios-kios ini para pedagang menyediakan kebutuhan para pengunjung, baik itu makanan olahan maupun kemasan (mie instan, kopi instan dll.), kebutuhan mandi (shampo, sabun dll), melalui kios pedagang ini pula pengunjung dapat memesan jasa transportasi motor untuk berkeliling disekita Pantai. Pedagang juga menyediakan kebutuhan lain bagi pengunjung seperti kayu bakar jika ada pengunjung yang ingin camping di area Pantai Nguyahan. Bangunan kios ini ada yang permanen dan semi permanen.

c. Area Parkir

Area parkir di Kawasan Pantai Nguyahan telah di beri konblok untuk memberi kenyamanan pada pengendara motor maupun mobil sehingga ketika musim penghujan tidak lagi becek atau ada genangan air. Terdapat tiga titik

yang dapat di jadikan sebagai tempat parkir motor, parkir motor dapat menampung sekitar 200 unit motor, misalkan jumlah motor yang membutuhkan tempat parkir membludak maka dapat di kondisikan di area depan warung. Untuk parkir mobil jarang di pergunakan, karena saat ini area parkir mobil masih di pusatkan di Pantai Ngobaran.

d. Papan Peringatan

Papan peringatan ini di pasang pada titi-titik yang mudah di lihat oleh pengunjung guna mencegah dan menjaga pengunjung dari hal-hal yang tidak di inginkan, diantara peringatanya adalah “dilarang berenang di laut”, “dilarang duduk di bawah tebing”. Rencananya papan himbauan ini akan terus di tambah untuk melengkapi larangan maupun aturan yang akan di terapkan di Pantai Nguyahan

e. Masjid

Masjid di Pantai Nguyahan dibangun dengan bantuan masyarakat, terletak diantara objek Pantai Nguyahan dan ngobaran untuk memudahkan pengunjung di kedua Pantai untuk menjangkau masjid. Masjid ini berarsitektur timur tengah dengan ciri khas masjid turki. Terdapat beberapa mukena dan sarung yang di sediakan bagi pengunjung yang membutuhkan. Tempat wudhu terpisah antara putra dan putri dengan halaman yang di tumbuhi rerumputan taman mampu menambah kenyamanan masjid.

3. Kesiapan *Stakeholder* Dalam Mengembangkan Wisata Halal

a. Kesiapan Dinas Pariwisata

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah, maka Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul melaksanakan urusan

pemerintahan dan tuas pembantuan di bidang kepariwisataan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas pariwisata mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan umum di bidang pariwisata.
- 2) Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata.
- 3) Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kepariwisataan.
- 4) Pembinaan, pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata.
- 5) Pengelolaan dan pengembangan sarana pendukung wisata.
- 6) Pelaksanaan pembinaan usaha dan pemasaran wisata.
- 7) Pembinaan dan pengembangan industri pariwisata.
- 8) Pembinaan pelaksanaan kerjasama di bidang pariwisata dan peningkatan kapasitas kelembagaan pariwisata
- 9) Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kepariwisataan.
- 10) Penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kepariwisataan
- 11) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang kepariwisataan; dan
- 12) Pengelolaan UPT

Visi kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul merupakan wujud atau bentuk masa depan yang diharapkan. Rumusan mengenai visi dan misi mencerminkan kebutuhan yang fundamental sekaligus memmanifestasikan dinamika pembangunan dari aspek realita yang terjadi. Visi kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016-2021 yaitu:

“ Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri dan sejahtera tahun 2021 ”

Sedangkan misi kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat

tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan dapat berhasil dengan baik. Adapun misi kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul adalah:

“Memantapkan pengelolaan pariwisata yang profesional.”

Tujuan pembangunan pariwisata merupakan hasil yang akan dicapai dalam melaksanakan misi, tujuannya yaitu:

- 1) Mewujudkan peningkatan daya saing pariwisata.
- 2) Mewujudkan perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan.

Sedangkan sasaran yang dituju, yaitu

- 1) Daya saing pariwisata meningkat
- 2) Pelestarian budaya berbasis pemberdayaan meningkat

Agar tujuan tersebut dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan, strateginya adalah:

“Meningkatkan promosi dan pemasaran pariwisata berbasis ekonomi kreatif, peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dan peningkatan fasilitas destinasi wisata.”

Sedangkan arah kebijakan pembangunan pariwisata adalah:

- 1) Mengembangkan *event* wisata dan budaya skala nasional, regional dan internasional.
- 2) Meningkatkan penyebaran informasi kepariwisataan.
- 3) Meningkatkan kualitas kelembagaan dan SDM (Sumber Daya Manusia)
- 4) Memelihara, merehabilitasi dan membangun destinasi pariwisata.

Terkait pengembangan wisata di Kabupaten Gunungkidul Dinas pariwisata sejauh ini telah berusaha untuk menyajikan objek wisata yang tidak menyalahi norma-norma agama Islam, baik itu dari segi fasilitas, perilaku, ataupun dari

segi kuliner. Modal awal untuk menuju wisata halal sudah ada, mulai dari SDM yang memperhatikan tentang unsur halal dan haram, fasilitas yang memenuhi kebutuhan wisatawan, penataan akses menuju objek wisata yang senantiasa di perhatikan untuk mempermudah wisatawan menjangkau lokasi, baik dengan perbaikan jalan, maupun menyediakan plang penunjuk jalan. Menurut Supriyanta, “yang kita kembangkan itu kan semua halal, artinya baik dari sisi layanan tentu yang benar, yang dekat dengan norma-norma agama. Yang lain terkait dengan makanan yang kita sajikan”(Supriyanta, 2018).

Menurut persepsi Supriyanta (2018) wisata halal merupakan suatu kegiatan wisata atau objek wisata yang berdasarkan nilai Islam sehingga hal-hal yang harus di penuhi diantaranya adalah sarana yang mendukung suatu produk halal serta berorientasi pada kebutuhan umat muslim secara khususnya seperti pembangunan masjid, penataan jalan, penataan Kawasan wisata serta kemudahan lain yang di rancang untuk mempermudah akses wisatawan muslim terhadap kebutuhan beribadah, “image kami halal itu sesuai dengan norma Islam, sehingga sarana yang mendukung halal khususnya bagi umat muslim seperti; pembangunan masjid, penataan Kawasan, juga dengan pembinaan kuliner, pedagang disana terkait makanan halal termasuk juga kita koorDinasi dengan pokdarwis setempat” (Supriyanta, 2018). Selain itu Dinas pariwisata juga menyadari akan pentingnya kualitas SDM dalam menyediakan olahan kuliner yang halal dan pengelolaan wisata lainnya seperti pokdarwis atau pemandu wisata. Maka dari itu Dinas pariwisata melakukan pembinaan kepada pelaku kuliner/pedagang kuliner yang melibatkan pihak eksternal, baik itu dari kalangan praktisi, maupun akademisi “ jadi itu bareng-bareng dengan pembinaan, disitu memang ada jam dalam JPL (jumlah jam pelajaran) materi tentang wisata halal”(Supriyanta, 2018). Mengenai hal-hal yang menjadi indicator kesiapan Dinas Pariwisata antara lain:

- 1) Sertifikat Halal

Supriyanta Kasubbag perencanaan Dinas Pariwisata Gunungkidul mengatakan bahwa setiap tahunnya menargetkan 25 sertifikasi halal untuk 25 pelaku usaha pariwisata yang terdiri dari resto“ jadi setiap tahun kita ada targetkan 25 sertifikasi yang terdiri dari hotel, restoran, penginap” (Supriyanta, 2018). Jumlah 25 sertifikat yang di anggarkan ini merupakan stimulus bagi pelaku usaha lainnya, di harapkan nantinya dapat menginformasikan dan menyebarkan kepada lainnya sehingga menjadi daya tarik bagi pelaku lain ikut berusaha mendapat sertifikasi halal, “diharapkan yang 25 ini menyebarkan, menginformasikan dan menjadi daya Tarik bagi yang lain” (Supriyanta, 2018). Langkah untuk pemeratakan sertifikat halal kepada seluruh pelaku usaha memang tidak mudah, karena memang image di masyarakat masih beranggapan bahwa tanpa sertifikat halal pun sudah bisa menghasilkan pendapatan yang cukup, tidak ada keperluan lebih untuk mendapat sertifika halal, menurut penyusun juga para pelaku usaha masih minim pengetahuan mengenai cara untuk mendapatkan sertifikat halal.

Sejauh ini Dinas pariwisata mencoba untuk membranding wisata halal, “kita membangun citranya dulu (wisata halal)”(Supriyanta, 2018). Dinas pariwisata mengakui untuk membangun citra ini memang tidak mudah karena juga image pedagang olahan masih beranggapan bahwa tanpa wisata halal pun mereka masih bisa laku, masih bisa mendapatkan rupiah. Dinas Pariwisata selama ini telah berusaha membangun citra objek wisata halal, sebagaimana yang di lakukan di Pantai Sepanjang, yaitu dengan mengadakan pengajian rutin tiap bulan.

Menurut penyusun mengenai kesiapan Dinas Pariwisata dalam mengembangkan Pantai Nguyahan menjadi objek wisata halal dari unsur sertifikasi halal masih kurang karena target 25 sertifikasi setiap tahun masih relative kecil untuk menjadi stimulant bagi pengusaha wisata di kabupaten Gunungkidul. Di Pantai Nguyahan sendiri berdasarkan observasi dan

wawancara dengan pedagang di Pantai Nguyahan selama ini target 25 sertifikat itu belum menyentuh pedagang di Pantai Nguyahan. Meskipun demikian penyusun mengapresiasi cara Dinas Pariwisata dalam menganggarkan 25 sertifikat halal kepada para pengusaha wisata.

2) Fasilitas dasar

Secara umum Dinas pariwisata mengusahakan sarana dasar lengkap untuk semua destinasi wisata seperti toilet, air tawar untuk membersihkan diri, cinderamata, cinderamata dll. Khusus untuk wisata halal dan salah satu upaya untuk membranding wisata halal Dinas pariwisata berusaha menambahkan hal-hal yang berorientasi kegiatan keagamaan (Islam). Orientasi muslim yang coba untuk di tambahkan untuk membranding wisata halal diantaranya diadakannya pengajian tiap bulan di masjid, sebagaimana branding wisata halal yang di lakukan untuk Pantai Sepanjang.

Di Pantai Nguyahan sendiri Dinas pariwisata juga mengusahakan hal serupa, meskipun belum sepenuhnya terlaksana, karena Pantai Nguyahan termasuk objek wisata yang baru di kembangkan dan masih dalam proses pengkajian wisata halal, Kasubbag perencanaan mengatakan “ sebenarnya Pantai Nguyahan ini Pantai yang baru, dibandingkan dengan Pantai ngobaran, sebenarnya itu pengembangan dari ngobaran dan ngrehan”(Supriyanta, 2018). Jadi di Nguyahan sendiri masih kita kaji tentang pengembangannya, meski bersebelahan dengan Pantai ngobaran yang dikenal sebagai Pantai kebinnekaan.

Saat ini Dinas pariwisata telah membangun toilet di Kawasan Pantai Nguyahan, toilet ini berstandar nasional namun belum sepenuhnya di fungsikan, ketika melakukan observasi peneliti tidak dapat masuk ke bangunan toilet, namun dari diskripsi masyarakat dan pokdarwis peneliti

menyimpulkan bahwa toilet tersebut memenuhi standard toilet wisata halal, hal ini di lihat dari fasilitas serta pemisahan toilet wanita dan pria. Dari bantuan masyarakat juga telah selesai di bangun masjid untuk mendukung sarana ibadah, masjid ini berada di pintu masuk Pantai Nguyahan. Fasilitas yang coba untuk di upayakan selain masjid Dinas pariwisata juga mengusahakan fasilitas pendukung seperti penyediaan kuliner agar para pedagang memiliki sertifikat halal. Lebih dari itu Dinas pariwisata masih terus melakukan pengkajian terhadap wisata halal, tentang hal-hal yang harus di penuhi.

Menurut penyusun mengenai fasilitas yang ada di Pantai Nguyahan secara fisik masih perlu ditingkatkan. Dari segi kebutuhan dasar seperti toilet, masjid, dll telah tersedia, namun belum sepenuhnya memenuhi standard halal seperti belum terpisahnya bangunan toilet pria dan wanita, masih belum adanya papan penunjuk lokasi untuk mempermudah menemukan letak masjid atau toilet. Fasilitas tersebut dapat kembangkan, sehingga memenuhi standard jika di beri pemahaman mengenai konsep wisata halal, serta ada pendampingan secara intens dari pihak terkait.

3) Peningkatan SDM

Selama ini Dinas pariwisata berusaha meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pembinaan-pembinaan, diantaranya adalah pembinaan kepada pedagang, pembinaan, kepada pokdarwis, pembinaan kepada pelaku usaha penginapan. Materi yang disampaikan beragam, salah satunya adalah mengenai produk wisata halal, “jadi itu (sosialisasi wisata halal) bareng-bareng dengan kegiatan pembinaan pedagang, disitu ada jam didalam JPL (jumlah jam pelajaran) nya itu materi tentang wisata halal” ujar Kasubbag perencanaan. Narasumber yang mengisi kegiatan tersebut biasanya dari praktisi, MUI atau pun Ormas Islam yang berkompeten

terhadap materi yang di sampaikan, namun narasumber yang secara khusus dari Lembaga terkait sertifikasi halal belum ada.

Meningkatkan SDM berarti meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha wisata, khususnya di Pantai Nguyahan untuk memberikan pelayanan kepada pengunjung dengan baik dan benar. Terkait SDM wisata Halal Deputy Pengembangan SDM Pariwisata Kementerian Pariwisata mengatakan di dalam acara Award Forum Travel Partner Indonesia (FTPI) di Jakarta “kalau kita bicara halal tourism kita belum memiliki standard untuk SDM” (Muhyidin, 2017) oleh karenanya belum ada indikator tetap untuk menentukan standar SDM, namun perlu memberi pemahaman untuk mengimplementasikan prinsip Islam dalam menyajikan objek wisata, sehingga dapat di wujudkan Wisata halal yang ideal. Berdasarkan observasi dan wawancara penyusun dengan masyarakat dan pengelola Pantai Nguyahan kesiapan SDM dalam mendukung pengembangan SDM wisata halal telah siap, namun belum ada bentuk sosialisasi atau pelatihan terkait wisata halal yang di selenggarakan.

4) Perlengkapan Bersuci dan Toilet

Menurut Kasubbag perencanaan, untuk perlengkapan urinoir yang bersekat memang belum ada. Menurut pengamatan penyusun, toilet di objek Pantai Nguyahan masih berbentuk sebagaimana kamar mandi sekaligus toilet, jadi masih berbentuk ruangan dengan bak mandi berisi air. Menurut Perlengkapan toilet semacam ini untuk masyarakat Indonesia, dianggap lebih baik karena toiletnya tertutup, berbeda dengan penggunaan urinoir yang tanpa sekat masih cenderung terbuka. Mengenai perlengkapan bersuci, Dinas pariwisata selalu berusaha memenuhi kebutuhan tersebut, karena memang ini merupakan kebutuhan yang pokok bagi masyarakat yang mayoritas muslim, di Pantai Nguyahan sendiri perlengkapan bersuci

praktis mudah di temukan baik itu di masjid maupun di area kamar ganti untuk pengunjung.

5) Perlengkapan ibadah dan suasana tempat yang nyaman

Menurut Kepala Sub Bagian (Kasubbag) perencanaan, di Pantai Nguyahan belum mencerminkan suasana tempat nyaman segi prasarana, karena memang ada beberapa kendala yang di hadapi, diantaranya adalah pemerintah tidak memiliki lahan resmi disana, sehingga untuk membangun infrastruktur harus melalui kerjasama dengan masyarakat baik itu dengan sewa atau lainnya, dapat juga dengan cara membeli lahan tersebut, dari sini akan meningkatkan anggaran yang harus di keluarkan sedangkan salah satu kendala lain yang di hadapi Dinas adalah anggaran yang belum mencukupi. Namun, Dinas juga tetap mengusahakan dana baik itu melalui CSR perusahaan ataupun dengan anggaran pemerintah. Terkait kebersihan Dinas pariwisata mengadakan kegiatan jumat bersih untuk menjaga kebersihan dan menerjunkan THL (tenaga harian lepas) untuk mengontrol kebersihan di lokasi Pantai Nguyahan “setiap Pantai kita sudah ada THL yang memang menjaga kebersihan di Pantai selain bekerjasama dengan pokdarwis”(Supriyanta, 2018) .

6) Penunjuk lokasi masjid penunjuk waktu sholat

Di Pantai Nguyahan belum ada petunjuk lokasi masjid. Menurut pengamatan yang di lakukan penyusun di masjid Pantai Nguyahan, fasilitas yang ada di dalam masjid adalah perlengkapan pendukung seperti tersedianya alquran, mukena, sarung bagi para pengunjung yang tidak membawa perlengkapan sholat. Untuk petunjuk waktu shalat secara khusus belum ada, terkait petunjuk arah kiblat pun belum ada, namun menurut pengamatan penyusun, pengunjung tidak akan kesulitan untuk mencari

arah kiblat, karena memang ada tempat imam yang sudah mengarah ke arah kiblat.

7) Upaya menghilangkan tindak asusila atau pornografi

Dinas pariwisata tidak sendiri dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata di Gunungkidul namun juga bekerjasama dengan pihak lain. Terkait tindak asusila atau pornografi Dinas bekerjasama dengan satuan polisi pamong praja (satpol PP) dalam menjaga ketertiban dan membersihkan dari tindakan yang mengarah pada pornografi. Menurut Kasubbag Perencanaan “kebetulan pariwisata ini menjadi visi bupati, sehingga ini harus didukung oleh semua OPD (organisasi perangkat daerah), jadi permasalahan terkait wisata juga menyangkut OPD lain, terkait asusila kami kerja sama dengan SATPOLPP jadi terkait hal-hal yang terkait dengan norma juga kita sampaikan dalam agenda jum’at bersih”(Supriyanta, 2018)

b. MUI Kabupaten Gunungkidul

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gunungkidul memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh Ridho Allah SWT. (baldatun thoyibatun wa robbun ghofur) menuju masyarakat berkualitas demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam”

Misi:

- 1) Menciptakan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam manamkan dan memupuk aqidah Islamiyah serta menjaankan syariat Islamiyah
- 2) Melaksanakan dakwah Islam, amarma'ruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (khoiru ummah)
- 3) Mengembangkan Ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Majelis Ulama Indonesia memiliki Sembilan Orientasi Pengkhidmatan yaitu:

1) *Diniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah pengkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatan yang didasari nilai dan ajaran Islam yang kaffah

2) *Irsyadiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawaban posiif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal shaleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fil khairaat)

3) *Istinjabiyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawaban posiif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat

melalui prakarsa kebajikan (amal shaleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (istibaq fil khairaat)

4) *Hurriyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

5) *Ta'awuniyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan dalam membela kaum dlu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan di kalangan seluruh lapisan umat Islam (Ukhuwwah Islamiyah). Ukhuwwah Islamiyah ini merupakan landasan bagi Majelis Ulama Indonesia untuk mengembangkan persaudaraan kebangsaan (ukhuwwah wathoniyah) dan memperkokoh persaudaraan kemanusiaan (ukhuwwah basyariyah).

6) *Syuriah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7) *Tasamuh*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah

8) *Qudwah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

9) *Duawaliyah*

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam

Berdasarkan jatidiri ulama sebagai warotsatul anbiyaa, maka secara umum Majelis Ulama Indonesia mempunyai peran sebagai :

1) Sebagai Ahli waris Para Nabi (warotsatul anbiyaa)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para Nabi, yaitu menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan seharai-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan Islam. Sebagai warotsatul anbiyaa (ahli waris tugas-tugas kenabian), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (an nubuwwah), yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuaensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebgain tradisi, budaya, dan peradaban manusia.

2) Sebagai Pemberi fatwa (Mufti)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3) Sebagai Pembimbing dan pelayan Umat (Ra'iy wa Khadim Al Ummah)

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai pelayan umat (khadi al ummah), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiyar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesiaberusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memepjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4) Sebagai penegak Amar Ma'ruf Nahyi Mungkar

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan amr makruh nahyi mungkar, yaitu dengan menegaskan kebenaran dengan penuh kikhmah dan istiqomah. Dengan demikian, Majelis Ulama Indonesia juga merupakan wadah perkhidmatan bagi pejuang dakwah (mujahid dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkalitas (*khairu ummah*) Sebagai pelopor Gerakan pembaharuan (*At Tajdid*) Majelis Ulama Indonesia sebagai pelopor tajdid yaitu gerakan pembaharuan Islam.

5) Sebagai pelopor gerakan Ishlah

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan yang terjadi di kalangan umat. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan al-jam'u wa taufieq (kompromi dan persesuaian) dan tarjih (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpelihara semangat persaudaraan (ukhuwwah) di kalangan umat Islam Indonesia.

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI telah menerbitkan fatwa nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah. MUI sendiri telah menegaskan peranya sebagai pengawas ke halalan suatu produk wisata. Begitu pula dengan MUI kab. Gunungkidul yang telah turut mendorong terlaksananya pariwisata Syariah. Menurut ketua MUI kab Gunungkidul "wisata halal merupakan bentuk dakwah kepada masyarakat serta upaya untuk membentengi masyarakat gunungkidul dari pengaruh negative dari luar" (Sukamto, n.d.). Oleh karenanya MUI gunungkidul telah melakukan sosialisasi mengenai wisata halal, baik itu dari sisi makanan, maupun aplikatif kegiatan wisata melalui pengajian-pengajian, maupun koorDinasi dengan daerah dan pusat. Meskipun sosialisasi tidak secara langsung terkait wisata halal, namun telah mencakup mengenai subtansi dari apa dan mengapa haram atau halal.

Peran MUI terkait wisata halal tidak secara langsung terjun di lapangan, peran MUI sebagai pengawas dilakukan dengan koorDinasi dan seruan yang dilakukan MUI kepada Dinas terkait. Sejauh ini MUI belum melakukan tindakan yang langsung berpegaruh kepada pelaku wisata seperti pelatihan terkait wisata halal kepada pihak swasta. Begitupula dengan regulasi khusus mengenai wisata halal, hingga saat ini belum ada aturan yang secara khusus mengatur tentang wisata halal.

Dalam mewujudkan wisata halal yang tersertifikasi, MUI berwenang untuk mengeluarkan surat pengantar kepada MUI pusat sebagai permohonan sertifikasi halal. Adapun terkait pendampingan terhadap UKM di Kawasan Pantai Nguyahan untuk mendapat sertifikat halal dari MUI belum ada. Menurut pengamatan penyusun, dari pihak MUI masih pada batas melakukan pengkajian tentang wisata halal. Selama ini pendampingan masih dilakukan kepada pedagang di pasar-pasar daerah Gunungkidul, menurut penyusun hal ini juga turut mempengaruhi terhadap kualitas halal yang ada pada objek wisata termasuk pantai Nguyahan karena pasoka kebutuhan pedagang juga berasal dari pasar-pasar tersebut.

Wisata halal bukan hanya terkait bagaimana mendapatka sertifikasi halal, namun juga terkait bagaimana menjaga kualitas dan menjaga produk tetap halal. Menurut ketua MUI pernah di adakan suatu koorDinasi dengan pemda, MUI dan tokoh agama salah satu pembahasanya terkait wisata halal di HUmas bupati, dan disana muncul usulan pembentukan pengawas produk halal. Sejauh ini usulan tersebut belum ada tindak lanjut, artinya belum terbentuk dan belum ada pembahasan lanjutan.

c. Pokdarwis

Kelompok sadar wisata, (pokdarwis) adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya Sapta Pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar (Kelompok Penggerak Pariwisata). Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa

masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk Meningkatkan pemahaman kepariwisataan.

- 1) Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat
- 2) Dalam pembangunan kepariwisataan.
- 3) Meningkatkan nilai manfaat kepariwisataan bagi
- 4) Masyarakat/anggota Pokdarwis.
- 5) Mensukseskan pembangunan kepariwisataan(Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012)

Sebagaimana di sebutkan di atas, Sapta Pesona adalah: “tujuh unsur pesona yang harus di wujudkan bagi terciptanya lingkungan yang kondusif dan ideal bagi berkembangnya kegiatan kepariwisataan di suatu tempat yang mendorong tumbuhnya minat wisatawan untuk berkunjung”(Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012)

Tujuh unsur tersebut adalah:

- 1) Aman

Aman yaitu suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang memberikan rasa tenang, bebas dari rasa takut dan kecemasan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan kdaerah tersebut.

Bentuk aksi yang perlu di wujudkan, antara lain:

- a) Sikap tidak mengganggu kenyamanan wisatawan dalam kunjunganya
- b) Menolong dan melindungi wisatawan
- c) Menunjukkan rasa bersahabat terhadap wisatawan
- d) Memelihara keamanan lingkungan
- e) Membantu memberi informasi kepada wisatawan
- f) Menjaga lingkungan yang bebas dari bahaya penyakit menular
- g) Meminimalkan resiko kecelakaan dalam penggunaan fasilitas public

2) Tertib

Tertib yaitu suatu kondisi lingkungan dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan sikap disiplin yang tinggi serta kualitas fisik yang konsisten dan teratur serta efisien sehingga memberikan rasa nyaman dan keastian bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.

Bentuk aksi yang perlu dilakukan antara lain:

- a) Mewujudkan budaya antri
- b) Memelihara lingkungan dengan mentaati peraturan yang berlaku
- c) Disiplin waktu/tepat waktu
- d) Serba teratur, rapi dan lancar.

3) Bersih

Suatu kondisi lingkungan serta kualitas produk dan pelayanan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sehat/ higienis sehingga memberikan rasa nyaman dan senang bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.

Bentuk aksi yang harus diwujudkan adalah:

- a) Tidak membuang sampah/limbah sembarangan
- b) Menjaga kebersihan lingkungan objek dan daya tarik wisata serta sarana prasarana pendukungnya,
- c) Menjaga lingkungan yang bebas dari polusi udara (akibat asap kendaraan, rokok atau bau lainnya).
- d) Menyiapkan sajian makanan dan minuman yang higienis. Menyiapkan perlengkapan penyajian makanan dan minuman yang bersih.
- e) Pakaian dan penampilan petugas bersih dan rapi.

4) Sejuk

Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang sejuk dan teduh yang akan

memberikan perasaan nyaman dan “betah” bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:

- a) Melaksanakan penghijauan dengan menanam pohon.
- b) Memelihara penghijauan di objek dan daya Tarik wisata serta jalur wisata.
- c) Menjaga kondisi sejuk dalam area publik/fasilitas umum, hotel, penginapan, restoran dan sarana prasarana dan komponen/fasilitas kepariwisataan lainnya.

5) Indah

Suatu kondisi lingkungan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan keadaan yang indah dan menarik yang akan memberikan rasa kagum dan kesan yang mendalam bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut, sehingga mewujudkan potensi kunjungan ulang serta mendorong promosi ke pasarwisatawan yang lebih luas.

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:

- a) Menjaga objek dan daya tarik wisata dalam tatanan yang estetik, alami dan harmoni.
- b) Menjaga lingkungan dan tempat tinggal secara teratur dan serasi serta menjaga karakter kelokalan.
- c) Menjaga keindahan vegetasi, tanaman hias dan peneduh sebagai elemen estetika lingkungan yang bersifat alami.

6) Ramah

Suatu kondisi lingkungan yang bersumber dari sikap masyarakat di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang mencerminkan suasana yang akrab, terbuka dan penerimaan yang tinggi yang akan memberikan perasaan nyaman, perasaan diterima dan “betah” (seperti di rumah sendiri)

bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:

- a) Bersikap sebagai tuan rumah yang baik dan rela serta selalu siap membantu wisatawan.
- b) Memberi informasi tentang adat istiadat secara sopan.
- c) Menunjukkan sikap menghargai dan toleransi terhadap wisatawan.
- d) Menampilkan senyum yang tulus.

7) Kenangan

Suatu bentuk pengalaman yang berkesan di destinasi pariwisata atau daerah tujuan wisata yang akan memberikan rasa senang dan kenangan indah yang membekas bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan atau kunjungan ke daerah tersebut.

Bentuk aksi yang perlu diwujudkan, antara lain:

- a) Menggali dan mengangkat keunikan budaya lokal.
- b) Menyajikan makanan dan minuman khas lokal yang bersih, sehat dan menarik.
- c) Menyediakan cinderamata yang menarik, unik/ khas serta mudah dibawa.

Mengembangkan kelompok masyarakat yang dapat berperan sebagai motivator, penggerak serta komunikator dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kepedulian masyarakat di sekitar destinasi pariwisata atau lokasi daya tarik wisata agar dapat berperan sebagai tuan rumah yang baik bagi berkembangnya kepariwisataan, serta memiliki kesadaran akan peluang dan nilai manfaat yang dapat dikembangkan dari kegiatan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam kedudukannya, pokdarwis berkedudukan di desa / Kelurahan di sekitar destinasi wisata.

Pembentukan podarwis bertujuan untuk :

- 1) Meningkatkan peran dan posisi masyarakat sebagai subjek atau pelaku penting dalam pembangunan kepariwisataan dan dapat bersinergi serta bermitra dengan emangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas perkembangan kepariwisataan di daerah
- 2) Membangun dan menumbuhkan sikap dan dukungan positif masyarakat sebagai tuan rumah melalui perwujudan nilai-nilai Sapta pwsna bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di daerah dan manfaatnya bagi pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memperkenalkan, melestarikan dan memanfaatkan potensi masing-masing daerah.

Adapun secara fungsi pokdarwis secara umum dalam kepariwisataan adalah:

- 1) Sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan wilayah destinasi wisata.
- 2) Sebagai mitra pemerintah dan pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam upaya perwujudan dan pengembangan sadar wisata di daerah.

Syarat-syarat umum keanggotaan pokdarwis adalah:

- 1) Bersifat sukarela
- 2) Memiliki dedikasi dan komitmen dalam pengembangan kepariwisataan
- 3) Masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi daya Tarik wisata dan memiliki kepedulian terhadap kepariwisataan
- 4) Mempunyai pencaharian atau pekerjaan yang berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan baik kebutuhan langsung maupun tak langsung
- 5) Jumlah anggota setiap pokdarwis minimal 15 orang. (Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012)

Kesiapan pokdarwis dalam mengembangkan wisata halal menurut ketua pokdarwis adalah terkait teknis di lapangan (objek wisata). Menurut pak simin,

(Pokdarwis, 2018) pokdarwis telah mendapat instruksi dari Dinas pariwisata untuk menjaga Pantai diantara instruksinya terkait dengan kebersihan, tata tertib dan teknis lain yang terkait kebutuhan lapangan. Meskipun Pantai Nguyahan tergolong Pantai baru di dikelola, namun pokdarwis telah mengusahakan beberapa hal untuk mempersiapkan diri menuju wisata halal. Sesuai instruksi Dinas pariwisata dan inisiatif pribadi berikut hal hal yang telah diperiapkan oleh pokdarwis:

- 1) Menjaga keamanan objek wisata: pokdarwis telah membentuk tim keamanan khusus yang berjaga siang dan malam di lokasi objek wisata, sereta telah bekerjasama dengan tim SAR untuk menjaga keamanan. Selain menjaga keamanan, tim keamananyang di bentuk ini berjaga seandainya ada pengunjung dari kalangan komunitas dan ingin mengadakan kegiatan di objek Pantai Nguyahan untuk membantu mengkondisikan lokasi.
- 2) Menjaga kebersihan objek wisata pantai: Pokdarwis Pantai Nguyahan sebisa mungkin untuk menjaga kebersihan Pantai Nguyahan, meski termasuk pantai yang baru namun kebersihan tetap dijaga oleh Pkdarwis sebagai upaya untuk memberi kenyamanan kepada pengunjung. Pokdarwis juga melakukan kegiatan rutin yang biasa di sebut dengan 'jum'at bersih' yaitu kegiatan bersih-bersih pantai secara Bersama oleh masyarakat dan pokdarwis Pantai Nguyahan yang biasa di lakukan pada sore hari.
- 3) Penanaman cemara: sebelumnya pokdarwis menerima bantuan benih cemara untuk di tanam di Kawasan Pantai Nguyahan, namun jumlahnya masih terbatas, kemudian dari pokdarwis berinisiatif untuk mencangkok dan menanam di Kawasan pantai untuk menciptakan suasana yang sejuk dan hijau, karena memang dikawasan Nguyahan masih mini pepohonan yan bisa di gunakan untuk berteduh.

- 4) Penataan objek wisata: yaitu dengan menambahkan tanah dan batuan untuk meninggikan permukaan tanah di area parkir dan area terbuka untuk memberi kenyamanan ketika musim hujan agar tidak becek.
- 5) Memasang konblok di area parkir: atas inisiatif pokdarwis, pemasangan konblok di area parkir telah mencapai kuranglebih setengah dari keseluruhan yang di butuhkan.

Meski telah melakukan persiapan sedemikian rupa untuk mempersiapkan objek wisata agar dapat segera diakui sebagai objek wisata halal, namun pokdarwis sendiri belum bisa menentukan seperti apakah standard yang harus di penuhi untuk mendapat sertifikat halal terkait objek wisata halal. Menurut pengamatan penyusun masih terdapat fasilitas yang belum ada di objek wisata Nguyahan seperti plang penunjuk arah masjid ataupun plang petunjuk lain yang diperlukan pengunjung untuk mengetahui informasi tentang lokasi tempat.

Terkait makanan halal dan perilaku pengunjung pokdarwis telah berusaha memberi seruan untuk selalu menjaga kehalalan produk yang dijual, tanggapan pedagang pun positif, meski belum mendapat sertifikat halal mui, namun masyarakat tetap yakin bahwa pengunjung akan tetap mempercayai produknya meski tidak ada sertifikat halal.

d. Pelaku Usaha

Pedagang di Pantai Nguyahan termasuk *stakeholder* pariwisata dari sektor swasta, para pedagang secara langsung berinteraksi dengan para pengunjung objek wisata, karenanya dalam menentukan kesiapan wisata halal tentunya penting untuk mendapat dukungan dari para pedagang di Pantai Nguyahan. Wawancara yang kami lakukan kepada ibu warni selaku perwakilan dari kelompok pedagang di objek Pantai Nguyahan mengatakan “oia jelas (mendukung wisata halal)”(Warni, 2018) ketika membahas tentang kesiapan

menyambut wisata halal. Meskipun menurut penyusun ibu warni belum sepenuhnya memahami tentang wisata halal, namun secara garis besar pedagang pada umumnya telah memahami konsep wisata halal “Wisata halal itu termasuk yang saya tahu dari segi masakan, yang dari bahan-bahan yang tidak membahayakan dan halal”(Warni, 2018).

Ada sekitar 20 pedagang yang menempati bangunan kios permanen di Kawasan Pantai Nguyahan. Olahan yang di sediakan pun beragam, mulai dari olahan laut hingga makanan instan seperti mie instan, minuman instan dan lainnya “olahan saya seafood, nasi goreng, dan lain-lain” (Warni, 2018) jelas ibu warni. Dari keseluruhan pedagang turut serta dalam menjaga kualitas makanan yang di sediakan di warung, meskipun belum memiliki sertifikat halal MUI “belum ada sertifikat halal MUI” ujar ibu warni, namun pedagang berusaha menjaga kehalalan makanan dengan terbuka terhadap cara, bahan dan lain-ain “untuk membuktikan ya kami kasih lihat cara kami, bahan-bahan kami”. Sejauh ini belum ada upaya dari pedagang untuk meraih sertifikat halal “belum ada (upaya dari pedagang untuk mendapat sertifikat halal)”, begitupula sosialisasi atau arahan dari Dinas atau pihak terkait untuk mengajukan permohonan sertifikat halal “belum pernah ada sosialisasi” ibu warni (Warni, 2018).

Pedagang di Pantai Nguyahan sebisa mungkin menjaga kenyamanan dan keamanan pengunjung di Pantai Nguyahan “kalo yang saya lihat selama ini semua warga disini kalau ada pengunjung yang datang suara kami ringan, selalu tersenyum, dan berusaha ramah, itu yang menurut saya cerminan tadi” tambah bu warni “yang jelas kalau saya berusaha untuk menjaga kenyamanan pengunjung, kami mencoba memberi kepercayaan kepada pengunjung,”(Warni, 2018). Terkait dengan keamanan dan kenyamanan pengunjung pedagang juga menjaga dari hal-hal yang bersifat pornografi atau asusila (Warni, 2018) “kita menindak lanjuti (terkait tindak asusila di Nguyahan)” ujar ibu warni. Di Kawasan Pantai Nguyahan belum ada

penginapan, namun tetap ada dari masyarakat yang menyewakan kamar bila ada pengunjung yang ingin menginap “insyaallah dari masyarakat penginapan itu di tiadakan, untuk menjaga kesakralan tempat karena Kawasan ini merupakan Kawasan religi”(Warni, 2018). Bilapun ada pengunjung yang ingin menginap tentu dengan pengawasan dan perhatian untuk memisahkan kamar oleh pemilik rumah untuk mencegah dari hal-al yang tidak di inginkan.

Menurut penyusun pedagang telah menjaga kualitas dari olahan yang di buat terutama tentang kehalalan karena memang pedagang seluruhnya adalah muslim. Meskipun belum mendapat sertifikat halal dan belum ada upaya untuk mendapatkannya namun pedagang telah bersiap menerima instruksi ataupun pendampingan tentang sertifikat halal. Pedagang juga berupaya menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung, sebisa mungkin meberikan keramahan kepercayaan untuk membuat pengunjung nyaman

e. Masyarakat

Masyarakat disini adalah pengunjung Pantai Nguyahan dan masyarakat yang tinggal di sekitar Pantai Nguyahan. Secara umum Masyarakat mendukung degan pengembangan Pantai Nguyahan menjadi objek wisata halal, menurut salah seorang pengunjung Pantai Nguyahan masyarakat merasa bangga, senang dan mendukung dengan pengembangan Pantai Nguyahan menjadi objek wisata halal “yang jelas bangga, senang, dan mendukung” (Lestari, 2018). Menurut warga lainnya terkait wisata halal di Pantai Nguyahan masyarakat juga mendukung pengembangan Pantai Nguyahan, “kalau Pantai itu ada penginapanya itu nanti ada dampak negatifnya” tambah Wahadi, namun jika penginapan itu bisa menjamin bebas dari tindak asusila ataupun pornografi maka masyarakat sangat mendukung pengembangan penginapan tersebut. Menurut masyarakat dukungan yang dapat di berikan adalah berupa dukungan dalam mempromosikan dan menjaga kualitas kehalalan, “ saget mawon

(promosi dan menjaga kualitas halal) mas”, menurut pengunjung “ kita mungkin bantu promosi, ajak-ajak saudara gitu”(Lestari, 2018).

Tabel 4. 1 kesiapan Dinas Pariwisata

No	Indikator	Kesiapan	Keterangan
1	Sosialisasi / pelatihan SDM	Belum siap	Selama ini sosialisasi dan pelatihan SDM terkait wisata halal belum terkhusus kepada Pedagang dan pengusaha wisata Pantai Nguyahan
2	Peralatan bersuci dan penyekat Urinoir	Peralatan bersuci siap. Urinoir belum siap	Peralatan bersuci termasuk dalam sarana dasar lengkap yang di tetapkan oleh Dinas pariwisata sehingga menjadi prioritas, untuk sekat urinoir belum tersedia
3	Mencegah tindak asusila dan unsur pornografi	Siap	Dinas pariwisata bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta keamanan lingkungan untuk mencegah terjadinya tindak asusila dan unsur pornografi lainnya

4	Perlengkapan ibadah, suasana bersih dan nyaman	Perlengkapan ibadah siap Suasana nyaman belum	Terdapat masjid yang di bangun oleh pihak swasta sebagai sarana ibadah di Pantai Nguyahan serta terdapat perlengkapan sholat. Suasana yang nyaman mungkin belum tercapai karena penataan wilayah yang belum terealisasikan
5	Papan informasi fasilitas wisata	Belum siap	Masih belum ada papan petunjuk untuk menunjukkan letak fasilitas umum
6	Menetapkan sistem jaminan produk halal/sertifikat halal	Belum siap	Pembentukan tim khusus untuk mengawasi kehalalan produk wisata masih pada wacana
7	Fasilitas dasar	siap	Kebutuhan dasar pengunjung seperti toilet, makanan dan lainnya telah tersedia di Pantai Nguyahan meskipun belum sepenuhnya tertata

Tabel 4. 2 Kesiapan MUI Gunungkidul

No	Indikator	Kesiapan	Keterangan
1	Mempersiapkan regulasi Pemda	Belum siap	Belum ada regulasi pemda yang secara khusus mengatur kepariwisataan halal/Syariah
2	Menyerukan semua organisasi sosial keagamaan	Siap	Selama ini MUI Gunungkidul telah menyeru kepada segenap organisasi keagamaan untuk ikut mendukung pengembangan wisata halal di Gunungkidul
3	Pendampingan untuk mendapat sertifikat hala	Belum siap	Pendampingan yang di lakukan MUI Gunungkidul masih belum maksimal, belum ada pendampingan terhadap plaku wisata terkait konsep wisata halal
4	Sosialisasi sertifikat halal	Belum siap	Selama ini sosialisasi mengenai sertifikat halal MUI belum mencakup pelaku wisata di Pantai Nguyahan

5	Organisasi khusus yang mengawasi kehalalan produk wisata	Belum siap	Pembentukan organisasi khusus ini masih pada tahap perencanaan, belum mencapai kesepakatan antar <i>stakeholder</i>
---	--	------------	---

Tabel 4. 3 Tabel kesiapan Swasta (Pedagang dan Penyedia jasa)

No	Indikator	Kesiapan	Keterangan
1	Pemisahan kamar untuk tamu bukan muhrim	Belum siap	Belum siap karena disana belum ada penginapan, namun warga menyewakan rumahnya jika ada yang membutuhkan
2	perlengkapan ibadah dan wudhu	Siap	Banyan terdapat tempat wudhu dan tempat untuk sholat
3	mengucap salam saat berkomunikasi	Siap	Masyarakat yang memang pada dasarnya ramah sehingga tidak sulit untuk mengucapkan salam dalam berkomunikasi
4	Buku-buku doa, informasi kegiatan keagamaan, dan larangan pengunjung bukan mahrom dalam satu kamar	Belum siap	Belum ada penyediaan perlengkapan buku-buku doa di tempat ibadah ataupun tempat

			lainya, untuk larangan pengunjung bukan mahrom masih disampaikan dengan lisan.
5	Keamanan dan kenyamanan jasa	Siap	Factor kenyamanan dan kenyamanan wisatawan menjadi prioritas bagi penyedia jasa.
6	Tidak menyediakan barang-barang haram	Siap	Meskipun belum memiliki sertifikat halal, namun pedagang telah menjaga dari bahan yang haram
7	Menjamin kehalalan produk	siap	Pedagang berskap terbuka dengan proses pembuatan serta bahan dari olahan yang dijual
8	Ramah kepada pengunjung dan karyawan	Siap	Pedagang selama ini telah menerapkan keramahan selain karena karakter daerah juga mereka memang menjaga sikap agar pengunjung nyaman
9	Keamanan serta kenyamanan pengunjung	Siap	Pedagang berusaha menyediakan kebutuhan pengunjung, dan

			menjaga keamanan baik produk maupun sikap
--	--	--	---

Tabel 4. 4 Tabel kesiapan Pokdarwis

No	Indikator	Kesiapan	Keterangan
1	Menjalankan dan menjaga aturan wisata halal	Siap	Pokdarwis telah bersiap untuk menjalankan aturan wisata halal. Meskipun belum ada ketetapan aturan namun Pokdarwis sudah bersiap menyambut aturan dan menjalankannya
2	Keamanan dan kenyamanan	Siap	Dari sisi keamanan pokdarwis telah bekerjasama dengan SAR dan membentuk tim keamanan untuk menjaga Pantai, dari sisi kenyamanan pokdarwis telah mengusahakan fasilitas dan suasana yang nyaman
3	Kebersihan lingkungan	Siap	Pokdarwis telah membuat agenda kebersihan rutin untuk menjaga kebersihan

4	Suasana sejuk, Indah dan ramah	Siap	Pokdarwis telah menanam beberapa pohon di beberapa titik untuk menambah kesejukan di area Pantai
---	--------------------------------	------	--

Tabel 4. 5 Tabel Kesiapan Masyarakat

5	Mendukung halal life style	siap	masyarakat menjadikan halal sebagai suatu tolak ukur karena mayoritas masyarakat dan pengunjungnya adalah Islam.
6	Mendukung pemerintah dalam mengembangkan wisata halal	siap	Masyarakat mendukung pembangunan pariwisata di Gunungkidul terlebih untuk wisata halal yang selaras dengan prinsip Islam
7	Memperluas lapangan kerja	siap	Masyarakat secara tidak langsung ikut memberi penghasilan kepada penduduk lokal, seperti jasa ojek atau lainnya
8	Mendorong wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Nguyahan	siap	Dengan kemudahan media sosial menjadi peluang untuk ikut

			memasarkan objek wisata secara aktif
9	Menumbuhkan rasa bangga	siap	Masyarakat ikut bangga dengan rencana pengembangan wisata halal di Pantai Nguyahan, karena termasuk hal yang baru

Tabel 4. 6 MUI Gunungkidul

B. Pembahasan

Perkembangan wisata halal di Gunungkidul sejauh ini masih dalam tahap pengkajian, sebagaimana yang di katakan kepala Dinas Pariwisata Asti Wijayanti kepada republika.co.id “sekarang kami baru mengonsep dan mengkaji bagaimana nantinya wisata halal tersebut. Jika belum bisa di terapkan (wisata halal) tahun ini, paling tidak tahun depan”(Republika.co.id, 2018). Oleh karenanya terkait dengan pengembangan wisata halal pada Pantai nguyahan masih perlu di lakukan pembenahan baik dari sarana maupun prasarana. Dari sisi sarana sejauh ini mungkin telah tersedia hal-hal yang menjadi kebutuhan wisatawan, namun belum tentu sesuai dengan standard halal yang berlaku. Begitu juga dengan prasarana sebagai penunjang utama, seperti kebijakan, aturan dan kemampuan SDM dalam mengimplementasikan objek wisata halal.

Pada dasarnya, wisata halal berarti mengutamakan produk-produk yang aman serta halal bagi pengunjung, tidak terbatas kepada muslim, tapi juga mencakup non muslim. Dalam menerapkan wisata Syariah di Indonesia yang di launching tahun 2014, kementerian pariwisata bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menentukan standard halal bagi produk-produk pariwisata. Menurut Ketua Umum MUI bahwa wisata Syariah adalah bagian dari dakwah(Jaelani, 2017). Hal ini sejalan

dengan yang di sampaikan oleh ketua MUI Gunungkidul “dengan adanya wisata halal ini diharapkan Islam mampu tampil dengan manis dalam bentuk pariwisata”(Sukamto, n.d.). MUI Gunungkidul sejauh ini telah ikut mendorong terwujudnya wisata halal melalui seruan kepada organisasi sosial keagamaan.

Untuk mengetahui pembahasan kesiapan dari setiap *stakeholder*, berikut pembahasannya:

1. Dinas Pariwisata

Dinas pariwisata merupakan pihak pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola potensi wisata di kabupaten Gunungkidul termasuk juga mengembangkan objek wisata halal di Pantai Nguyahan. Menurut peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah, Dinas Pariwisata menjadi pihak penggerak pengembangan wisata halal di Pantai Nguyahan terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola serta mengembangkan wisata halal, menurut parameter peraturan menteri No. 2 tahun 2014 Dinas pariwisata masih perlu melakukan peningkatan sarana dan prasarana serta mencetak Sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan integritas dalam mengimplementasikan konsep wisata halal, serta mengembangkannya.

Salah satu prinsip pengembangan wisata halal adalah pengembangan fasilitas wisata yang berbasis Syariah baik dalam skala besar maupun skala kecil termasuk pula pelayanan yang terkait di dalamnya. Pada objek Pantai Nguyahan fasilitas yang di maksud adalah dalam skala kecil beserta pelayanan didalamnya, di Pantai Nguyahan pengunjung dengan mudah dapat menemukan fasilitas ibadah berupa masjid, tempat untuk bersuci dan perlengkapan lain, hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Parekras dalam menentukan parameter destinasi wisata halal. Namun di sisi lain dari aspek fasilitas masih terdapat kekurangan dalam bentuk himbuan terhadap larangan tindak asusila atau yang dapat mengarahkan kepada hal-hal negative. Begitu juga dengan papan informasi untuk mempermudah

pengunjung dalam mengakses kebutuhan baik berupa lokasi tempat atau informasi keagamaan baik berupa bulletin atau fasilitas lainnya yang bernuansa Islam belum tersedia, menurut peneliti hal inilah salah satu cara untuk membranding Pantai Nguyahan menjadi wisata halal selain juga merupakan kebutuhan pengunjung.

Menurut laporan akhir kajian pengembangan wisata Syariah menjelaskan penilaian destinasi wisata dilihat dari beberapa aspek yaitu: produk, SDM serta kelembagaan, dan promosi (Andriani, 2015). Dari penilaian ini dapat menjadi langkah strategis bagi Dinas Pariwisata dalam menyusun perencanaan. Pentingnya peran pemerintah ada dalam setiap langkah persiapan wisata halal, oleh karena itu sebaiknya Dinas Pariwisata Gunungkidul membentuk tim khusus untuk mengembangkan wisata halal.

Langkah lain yang dapat di ambil untuk mendorong percepatan wisata halal di Gunungkidul adalah dengan membuat Kawasan percontohan wisata halal yang secara khusus di bentuk untuk menjadi parameter bagi obyek wisata lain untuk menjadi objek wisata halal. Pantai Nguyahan memiliki potensi untuk di jadikan Kawasan percontohan, jika di lihat dari sarana dan prasarana yang telah di bangun maka perlu dilakukan pengembangan terhadap fasilitas yang sudah ada. Wisata halal tidak cukup dengan fasilitas yang memadai, tetapi juga aspek Sumber daya manusia.

Dalam manajemen sumber daya manusia Syariah dalam melakukan perencanaan serta mengimplementasikan wisata halal maka perlu menanamkan pemahaman Islam dengan benar. Karena orang yang melakukan sesuatu berdasarkan alquran dan hadist akan mendapatkan keselamatan sepanjang hidupnya. Menurut KH Didin Hafinudin terdapat tiga hal penting dalam manajemen sumber daya manusia Islam, pertama perilaku sumber daya manusia Syariah haruslah memiliki nilai iman dan tauhid sehingga selalu merasa diawasi oleh Allah, kedua struktur organisasi dalam manajemen sumber daya manusia

Syariah sangatlah penting untuk membuat perencanaan, serta menjamin fleksibilitas antar posisi yang saling berinteraksi. Yang ketiga adalah sistem Syariah yang di susun harus menjadikan perilakunya berjalan dengan baik (Priyadi, 2016).

Sumber daya masyarakat di Pantai Nguyahan masih perlu pengarahannya dalam mewujudkan Sumber daya manusia Islam dalam menjalankan pariwisata halal. Menjadi tugas besar bagi pemerintah dalam mendidik serta mengarahkan para pelaku wisata untuk mampu menjadikan objek Pantai Nguyahan menjadi wisata halal. Belakangan telah kita kenal strategi pengembangan SDM yang dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk *community development* untuk mengembangkan masyarakat desa, dengan model kelembagaan yang menekankan kepada investasi dalam bidang Pendidikan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan kapasitas ordagisasi tingkat desa yang berkelanjutan, memaksimalkan peran organisasi pedesaan untuk efisiensi, menghilangkan mental negative, maalas, konsumtif dll, dan memperbaiki budaya kerja dan bertanggung jawab.

Terkait dengan produk dan promosi Dinas Pariwisata tidak akan sulit untuk mengarahkan SDM dalam memproduksi produk halal maupun pelayanan yang berbasis Syariah. Karena mayoritas SDM adalah muslim, oleh karenanya Dinas pariwisata mudah memberi pengertian mengenai halal dan haram serta memberi pelatihan tentang etika Islam dalam memberi layanan kepada pengunjung. Sejauh ini masyarakat telah membuat peraturan tidak tertulis terkait minuman haram di area Pantai nguyahan, hal ini mengacu kepada keyakinan masyarakat yang menganggap minuman keras adalah haram, hal ini sesuai dengan permen parekraf tahun 2014. Dalam hal promosi Dinas Pariwisata dapat menggandeng pihak-pihak penggiat halal travel atau pegiat sosial media, sebagaimana mempromosikan objek wisata lainnya.

2. MUI Gunungkidul

Sebagai pihak pengawas kehalalan serta mengeluarkan surat pengantar untuk mendapat sertifikat halal maka MUI berperan dalam proses sosialisasi serta pendampingan kepada para pelaku usaha wisata untuk memperoleh sertifikat halal, serta merealisasikan prinsip Islam dalam menyajikan objek wisata halal. Sesuai dengan peraturan Menteri No.2 tahun 2014 maka MUI menjadi penjamin sistem wisata halal, yang berarti tidak hanya halal dari sisi makanan tapi juga halal dari sisi layanan serta akomodasi. Selama ini upaya yang dilakukan oleh MUI Gunungkidul adalah berkoordinasi dengan organisasi sosial keagamaan, hal ini mencerminkan dukungan MUI Gunungkidul dalam mewujudkan objek wisata halal, meskipun sejauh ini belum ada dampak secara langsung namun menurut penyusun hal ini merupakan dukungan penting dalam bentuk moral.

Dalam wisata halal, destinasi yang ditunjuk menjadi objek wisata halal wajib menyediakan makanan halal serta memudahkan akses ibadah, serta pelayanan yang baik. Untuk menerbitkan Sertifikat halal MUI, maka terlebih dahulu melewati BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebagai badan yang menjamin mutu kesehatan dan kebersihan suatu produk, oleh karenanya bagi wisata non muslim wisata halal dapat menjadi produk yang aman bagi wisatawan. Oleh karena itu MUI perlu menggerakkan agen-agen wisata untuk ikut mendorong terwujudnya wisata halal di Gunungkidul, khususnya Pantai Nguyahan.

Dalam modifikasi permen parekrif terdapat tiga hal yang menjadi sorotan dalam penjaminan mutu wisata halal, yang pertama adalah makanan halal, kemudian pramuwisata (pemandu wisata) dan ketiga adalah terjaga lingkungan sehat dan bersih (Priyadi, 2016). Dalam skala besar Raseno Arya sebagai asisten deputi pengembangan segmen pasar kementerian pariwisata menyebutkan dukungan untuk memperkuat wisata halal dari menteri pariwisata adalah dengan mengeluarkan kebijakan perlu sertifikat halal pada Restoran, hotel dan pemandu wisata (Arah.com, 2017). Dalam skala Pantai Nguyahan maka perlu adanya sertifikat halal kepada pemandu wisata dalam hal ini bisa pokdarwis, maupun tim

khusus yang di bentuk sebagai peramuwisata. MUI juga perlu memberikan sertifikat kepada warung penyedia makanan olahan maupun kepada penyedia makanan olahan lain (dtang dari luar) yang di sediakan di Pantai Nguyahan.

Dengan adanya serifikat halal yang di keluarkan MUI untuk pemandu dalam hal ini adalah SDM wisata diPantai Nguyahan berarti MUI berperan dalam menyiapkan standarisasi Syariah untuk pemandu. Sebagai pengawas aspek Syariah pada wisata halal, maka seharusnya MUI bertindak dalam pendampingan, pembinaan manajemen dalam aspek Syariah serta menjadi konsultan dalam operasional. Kemudian Dinas pariwisata turut peran dalam promosi serta pemenuhan aspek lain dari wisata halal.

Menurut Arya “halal itu salah satunya di cerminkan dari kebersihan. Itulah kenapa wisata halal menjadi tujuan wisatawan mancanegara saat ini karena terjamin kebersihan dan kenyamanan” beliau juga mencontohkan kebersihan dan kenyamanan, “misalkan kebersihan toilet dan taksi, wisatawan akan lihat kebersihannya, berbau asap rokok atau tidak, hal ini tidak boleh luput dari perhatian karena dalam wisata halal kebersihan harus terjamin (Arah.com, 2017). Dari sini dapat kita artikan sebegitu detail kebersihan dan kenyamanan yang harus di perhatikan MUI dalam menentukan standar kenyamanan dan kenyamanan, untuk itu perlu di lakukan peningkatan kesadaran masyarakat akan kebutuhan dan keinginan wisatawan. Langkah yang dapat di lakukan adalah dengan dilakukan penyuluhan-penyuluhan serta dapat juga merangkul pihak lain untuk mewujudkan kesadaran tersebut. Dari penjelasan sebelumnya kita dapat simpulkan bahwa inilah urgensi dari sinergi Dinas Pariwisata dan MUI Gunungkidul serta pihak lain yang mampu mendukung terwujudnya wisata halal, diharapkan seruan serta koorDinasi yang di lakukan oleh MUI dapat dilakukan secara luas serta mencakup banyak pihak.

3. Swasta

Pedagang serta penyedia jasa di objek Pantai Nguyaha adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan pengunjung, karenanya berperan penting dalam mewujudkan objek wisata halal. Dalam memberikan produk baik barang maupun jasa, pihak swasta telah memegang konsep halal meskipun belum mengantongi sertifikat halal. Menurut mereka, para pedagang Pantai Nguyahan siap menerapkan konsep wisata halal jika sewaktu waktu dari Dinas Pariwisata maupun MUI datang untuk memberi pendampingan maupun pelatihan. Untuk saat ini pihak swasta memang belum siap jika mengacu kepada peraturan menteri No. 2 tahun 2014, masih perlu perubahan pada beberapa aspek, seperti pemisahan bangunan kamar mandi pria dan wanita.

Sejauh ini para penyedia jasa dan barang di Pantai nguyahan yang telah mengusahakan kebutuhan dasar para wisatawan. Menurut, ketua asosiasi hotel dan restoran Syariah (Ahsin) Jawa Tengah, Heru Isnawan, pengembangan wisata Syariah belum direncanakan serius sehingga swasta yang mengambil potensi tersebut (Priyadi, 2016). Swasta memiliki peluang untuk mengembangkan wisata halal di Pantai Nguyahan, tantangan yang dihadapi adalah pihak pedagang, atau penyedia jasa mampu meyakinkan wisatawan dalam kualitas produk baik dari bahan, kebersihan tempat, keamanan dan kenyamanan. Dari aspek fasilitas, sejauh ini sudah terpenuhi seperti toilet, kebutuhan untuk ibadah baik tempat, perlengkapan bersuci dan lainnya. Namun perlu di perbaiki dalam sistem pengolahannya. Menurut parameter permen parekrif tahun 2014 perlu adanya penyekat antar urinoir, dalam konteks Pantai Nguyahan dapat di artikan adanya kamar mandi yang terpisah. Sepanjang pengamatan penyusun, toilet di Pantai Nguyahan belum ada pemisahan kamar mandi secara khusus antar lawan jenis dengan bangunan yang terpisah.

Pedagang di area Pantai nguyahan menjadi kunci penting dalam mewujudkan wisata halal, karena dari pedagang ini pelayanan yang ramah serta produk olahan makanan serta jasa di berikan kepada wisatawan. Makanan yang

sehat serta aman bagi wisatawan tentunya akan memberi nilai lebih terhadap suatu objek wisata. Sebagaimana wisata halal tidak hanya memberikan keindahan tempat tetapi juga nilai lebih berupa etika, kesan, dan nafas Islam dalam menyambut wisatawan. Etika pramuwisata dalam menyambut wisatawan juga menjadi aspek penting, hal ini berkaitan dengan etika serta sopan santun, penampilan busana pramuwisata juga perlu diperhatikan. Belum adanya konsep yang baku tentang wisata halal membuat para pedagang serta pihak swasta kesulitan menentukan strategi pengembangan.

Sebagaimana yang di katakana oleh Arya” halal itu salah satunya di cerminkan dari kebersihan. Itulah kenapa wisata halal menjadi tujuan wisatawan mancanegara saat ini karena terjamin kebersihan dan kenyamanan” (Arah.com, 2017). Wisata halal tidak akan terwujud jika belum mampu menyajikan objek wisata yang bersih aman serta nyaman, hal ini tentunya memerlukan kontribusi beberapa pihak terkait, seperti Dinas lingkungan hidup.

Di area Pantai Nguyahan belum terdapat jasa penginapan, menurut narasumber, hal itu dikarenakan kekhawatiran masyarakat jika di bangun penginapan maka akan ada dampak negative yang lebih besar. Hal ini tentu menandakan betapa masyarakat sangat peduli dengan perilaku wisatawan. Meskipun demikian, penginapan merupakan bagian yang tidak terlepas dari pariwisata, sehingga menurut penyusun, perlu di bangun penginapan sebagai pelengkap untuk memenuhi kebutuhan pengunjung, dengan ketentuan Syariah yang di implementasikan, serta memberi corak nuansa Islam dalam operasionalnya. Hal ini tentunya akan menjadi daya Tarik tersendiri, mengingat masih jarang adanya penginapan yang bernafaskan islam dalam operasionalnya.

4. Pokdarwis

Pokdarwis menjadi pelaksana didalam menjalankan konsep wisata halal, sebagaimana di Pantai Nguyahan, Pokdarwis telah bersiap dengan instruksi

pemerintah untuk menyambut pengembangan wisata halal di Pantai Nguyahan, baik dari aspek kebersihan, keamanan dan kenyamanan. Pokdarwis sejauh ini memang terlihat siap dengan rencana wisata halal, jika mengacu pada parameter peraturan menteri No. 2 tahun 2004 MUI hampir memenuhi parameter tersebut, menurut penyusun pokdarwis masih belum dapat menentukan parameter wisata halal sehingga belum dapat menentukan langkah tepat untuk mewujudkan wisata halal di Pantai Nguyahan.

Dalam proses pengembangan objek wisata Pantai Nguyahan, pokdarwis dapat melakukan peningkatan pada percepatan pembangunan dengan berkonsultasi serta turut bersinergi dengan pihak pemerintah maupun swasta. Seperti misal merangkul pihak akademisi untuk turut mendampingi dalam mengembangkan wisata halal. Sehingga pokdarwis turut aktif dalam merangkul pihak lain, dan tidak hanya menunggu intruksi dari pemerintah. Menurut penyusun demikian adalah salah satu solusi yang dapat di tawarkan untuk turut mempercepat pembangunan wisata halal.

Pembentukan pokdarwis memiliki tiga tujuan, yang pertama adalah untuk meningkatkan peran peranserta masyarakat dalam mendukung pembangunan pariwisata serta mampu bersinergi dengan pemerintah, kedua untuk membangun kesadaran masyarakat sebagai tuan rumah pariwisata serta turut dalam membangun nilai-nilai sapta pesona sehingga mampu mesejahterakan masyarakat, ketiga adalah memperkenalkan, melestarikan serta menjaga potensi wisata daerahnya. Berangkat dari tujuan inilah Pokdarwis untuk mewujudkan wisata halal, hal ini tak lepas dari tujuan hidup seorang muslim adalah beribadah, tentunya hal ini akan menjadi selaras dalam proses pembangunan wisata halal di Pantai Nguyahan.

5. Masyarakat

Masyarakat merupakan *stakeholder* utama karena sebagai pihak yang terkena dampak secara langsung, menurut narasumber kami, masyarakat bersikap mendukung terhadap pengembangan wisata halal, penyusun mengamati bahwa pengunjung dan masyarakat merasa lebih senang jika berkunjung pada objek wisata yang di akui Halal. Kesiapan masyarakat sejauh ini berupa dukungan moral serta siap untuk turut memasarkan objek wisata halal. Pada umumnya masyarakat akan ikut berpartisipasi untuk mewujudkan wisata halal, selama itu mampu memberikan kontribusi pariwisata yang lebih baik, terutama dalam menarik minat wisatawan dan memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.

Dalam proses pembangunan industri wisata khususnya objek wisata halal yang targetnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Masyarakat disini mencakup pengunjung serta warga yang tinggal di sekitar objek wisata. Pengunjung Pantai Nguyahan menjadi motifasi dalam percepatan pembangunan wisata halal, karena ketika suatu objek wisata akan mendapat perhatian lebih setelah pengunjung memberikan penilaian. Dari sini maka pengunjung hendaknya mendukung serta memahami tentang etika berwisata, berwisata dalam Islam adalah untuk memikirkan serta menyaksikan keagungan ciptaan Allah, sehingga tidak melenceng dari alur tujuan tersebut. Perjalanan dalam Islam dapat bernilai ibadah, oleh karenanya pengunjung Pantai Nguyahan hendaknya tidak melakukan perbuatan yang terlarang. Adapun bagi pengunjung selain muslim, maka perlu di adakan semacam himbuan baik tertulis maupun secara langsung bahwa Kawasan Pantai Nguyahan adalah Kawasan dengan aturan khusus (Syariah) yang harus di taati.

Bagi warga di sekitar objek wisata, masyarakat hendaknya bersikap mendukung serta turut berpartisipasi dengan program atau arahan dari pemerintah dalam pembangunan obyek wisata halal. Perlu disadari oleh masyarakat bahwa memajukan pembangunan suatu objek wisata perlu diawali dengan mendorong produk lokal. Di Pantai Nguyahan sendiri, masyarakat beberapa tahun terakhir

telah mengembangkan produk olahan makanan ringan berbahan dasar rumput laut ulfa, menurut hemat penyusun, hal ini adalah salah satu peluang untuk di tingkatkan sehingga menjadi produk unggulan bagi Pantai Nguyahan.

Menurut Gunn dalam Wilson (2001) salah satu factor keberhasilan pariwisata adalah keramahtamahan (Priyadi, 2016). Dalam hal ini tentu masyarakat lokal sebagai tuan rumah yang harus ramahtamah terhadap pengunjung sebagai tamu. Keramahtamahan tersebut tercermin dari sikap masyarakat dalam menyambut dan menerima para wisatawan di tempat mereka. Sikap merupakan kondisi mental yang kompleks yang melibatkan keyanikan dan perasaan, serta disposisi untuk bertindak dengan cara tertentu. Selain menunjukkan keramahtamahan, sikap juga menunjukkan dukungan masyarakat terhadap kepariwisataan di suatu wilayah. Sikap masyarakat yang di wujudkan dalam partisipasi masyarakat sudah barang tentu merupakan factor yang akan mendukung keberhasilan pengembangan desa wisata. Terkait kesiapan masyarakat terhadap perubahan yang akan terjadi dari pengembangan daerah wisata halal, jika masyarakat mamahami kehadiran pengembangan pariwisata maka akan berdampak positif bagi setiap anggota masyarakat yang akhirnya akan tercipta suasana baru yang terpelihara sebagaimana harapan bersama.